

SKRIPSI

**PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues)**



Disusun Oleh:

BAIHAQQI

NIM. 160602173

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Baihaqqi
NIM : 160602173
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini , maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Baihaqqi

Baihaqqi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues)**

Disusun Oleh:

Baihaqqi
NIM. 160602173

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004



Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif
Ekonomi Islam
(Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

Baihaqqi
NIM. 160602173

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata (S-I) dalam Bidang Ekonomi Syariah
Pada Tanggal: Kamis, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Analiansyah
NIP. 1974040720000331004

Sekretaris



Seri Murni, SE., M.Si.Ak
NIP. 197210112014112001

Penguji I



Dr. Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II



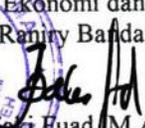
Dara Amanatillah, M. Sc.Fin
NIDN. 2022028705

AR-RANIRY



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Baihaqqi
NIM : 160602173
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Baihaqqiarga@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah: Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul : **Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Baihaqqi

NIM. 160602173

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004

Seri Murni, SE., M.Si., Ak

NIP. 197210112014112001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)". Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, MA selaku pembimbing I dan Ibu Seri Murni, SE., M.Si.Ak selaku pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua Ayahanda tercinta M.Jalim dan Ibunda tercinta Semidar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Fahrur Nurhabibie dan Andri Pradika, dan seluruh teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

AR - RANIRY
Penulis,

Baihaqqi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla* 

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

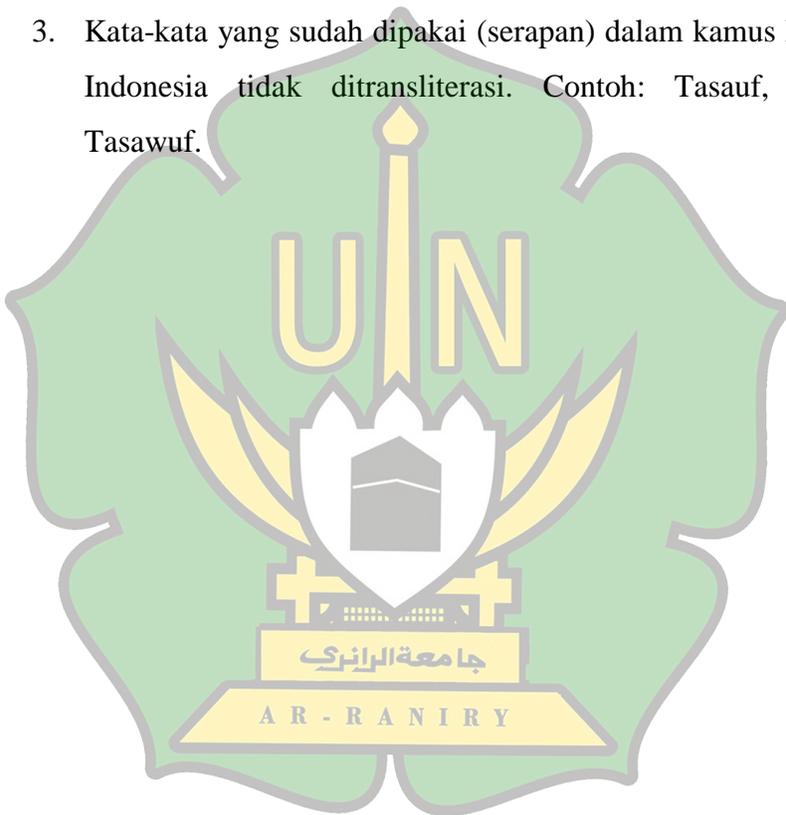
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Baihaqqi
NIM : 160602173
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Program Pembangunan Kampung Dalam
Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Kampung Terangun Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues)
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si.Ak.
Kata Kunci : Pembangunan Kampung, Pengentasan
Kemiskinan, Ekonomi Islam.

Pembangunan kampung merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi faktor yang menghalangi proses pembangunan kampung. Di Kampung Terangun perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya rata-rata pekerjaan masyarakat adalah bertani, berternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kampung Terangun melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Program Pembangunan Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

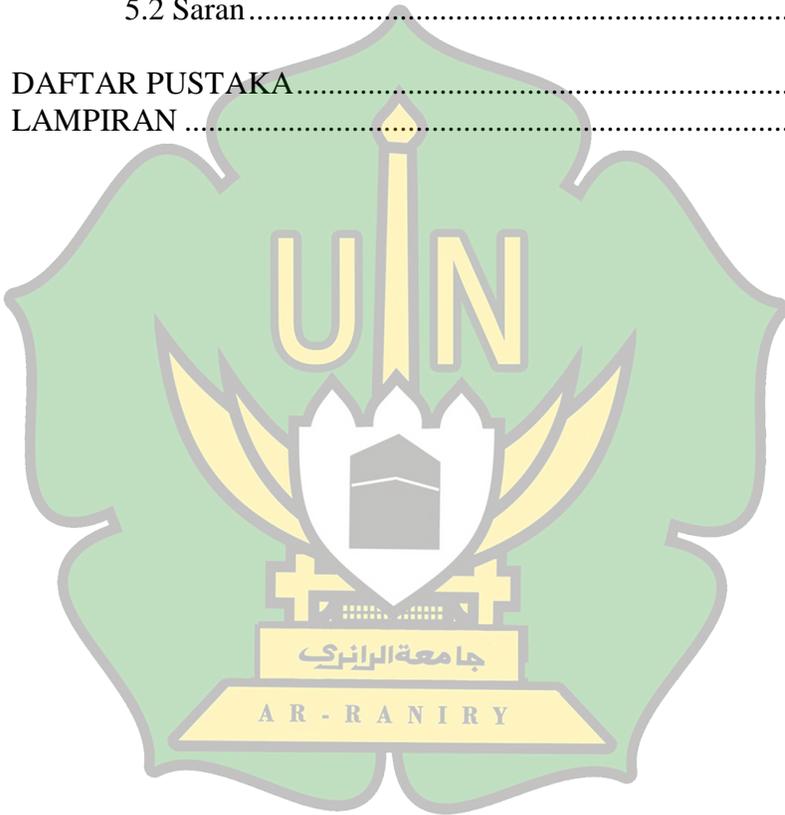
Kata kunci: Pembangunan Kampung, Pengentasan Kemiskinan, Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Pengertian Kampung	9
2.2 Karakteristik Perkampungan	10
2.3 Pemerintahan Kampung	11
2.4 Dasar-dasar Pembangunan Kampung	13
2.5 Otonomi.....	15
2.6 Perencanaan Pembangunan Kampung	17
2.7 Pembangunan Kampung dalam Manajemen Pembangunan Daerah	21
2.8 Konsep Kemiskinan I. B. Y.	23
2.8.1 Pengertian Kemiskinan	23
2.8.2 Ukuran Kemiskina.....	25
2.8.3 Penyebab Kemiskinan	27
2.8.4 Pengentasan Kemiskinan.....	29
2.9 Strategi.....	42
2.10 Strategi Penciptaan Wirausaha Baru	45
2.11 Ekonomi Islam	47
2.12 Konsep Pembangunan dalam Islam	50
2.13 Penelitian Terkait	59

BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	67
3.1.1 Jenis Penelitian.....	67
3.1.2 Sifat Penelitian	68
3.2 Sumber Data.....	68
3.2.1 Data Primer	68
3.2.2 Data Sekunder	69
3.3 Teknik Pengumpulan Data	70
3.3.1 Metode Wawancara.....	70
3.3.2 Metode Observasi.....	70
3.3.3 Metode Dokumentasi	71
3.4 Teknis Analisi Data	71
3.4.1 Editing	72
3.4.2 Organizing	72
3.4.3 Analyzing	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	74
4.1 Profil Kampung	74
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kampung Terangun.....	74
4.1.2 Keadaan Geografis Kampung Terangun	75
4.1.2.1 Batas Wilayah	75
4.1.2.2 Luas Wilayah	75
4.1.3 Struktur Perangkat Kampung	76
4.1.4 Visi Dan Misi Kampung Terangun	77
4.1.5 Kependudukan.....	77
4.1.5.1 Jumlah Penduduk.....	77
4.1.5.2 Data Tingkat Kemiskinan Kampung Terangun	78
4.1.5.3 Kondisi Ekonomi Kampung Terangun	79
4.1.5.4 Kondisi Pendidikan Kampung Terangun	80
4.2 Program Pembangunan Yang Sudah Berjalan	81
4.3 Pembahasan.....	84
4.3.1 Strategi Program Pembangunan kampung dalam Pengentasan Kemiskinan	84

4.3.3 Pembangunan Kampung dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.....	104
BAB V PENUTUP	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 2.1	Matrik Penelitian Terkait	35
Tabel 3.1	Subjec Penelitian	39
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kampung Terangun	78
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Miskin Kampung Terangun	79
Tabel 4.3	Daftar Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Terangun	79
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	116
Lampiran 2 Dokumentasi penelitian.....	118



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. “Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatan sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan” (Nurman, 2015).

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga, hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebab dan akibat (teori Nurkse) telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah.

Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan suatu masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.

Namun pada kehidupan nyata, masalah-masalah sosial terus menjadi bahan perbincangan dan bahkan menjadi agenda pembahasan negara yang sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah tentang pengentasan kemiskinan khususnya di negara Indonesia ini, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang mencoba memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini (Soetomo, 2008).

Dalam pandangan Islam kemiskinan dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan, karena wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang di anugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya. Oleh karena itu jika kelangkaan itu muncul, maka akibat kesalahan orang dalam memanfaatkannya, melestarikan atau karena kebodohan dan kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai penghambat sosial yang harus ditanggulangi (Muhammad Tholhah, 2005).

Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perdesaan hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai priotas mendesak, khususnya terhadap masyarakat perdesaan. PNPM-MD sebagai program

penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif (Angga Harahap, 2010).

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pembangunan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus memperbaiki taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan.

Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk memberi ketrampilan, dan kerajinan dalam membentuk perekonomian pedesaan. Di daerah tersebut masih sulit pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa. Di daerah Terangun perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya, rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, beternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang.

Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Akibat dari tertinggalnya perekonomian perdesaan maka pemerintah mengadakan pelatihan, dengan tujuan membentuk karakter setiap pemuda dalam membangun Perekonomian desa. Di daerah tersebut masih kurang banyak fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2015	21,95 %
2016	21,86 %
2017	21,97 %
2018	20,70 %
2019	19,87 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, (2021)

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk di Kabupaten Gayo Lues merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Dari alasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul **“Program Pembangunan Kampung dalam Pengentasan Kemiskinan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Terangun?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Terangun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Terangun.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan pada Kampung Terangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Manfaat Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi

program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam. Secara teoritis manfaat penulis akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada kampung terangan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

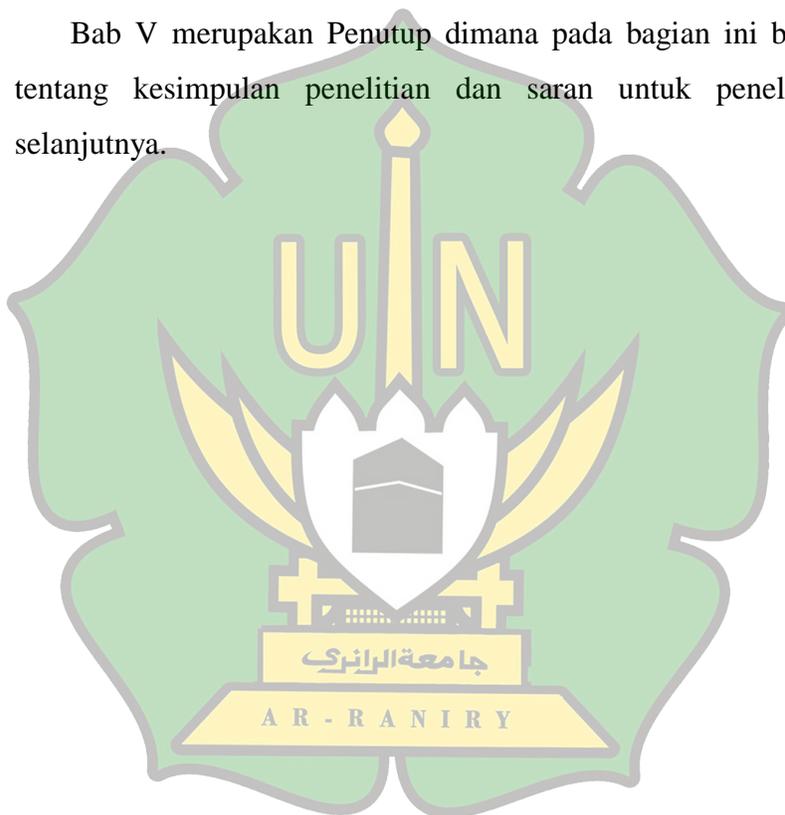
Bab II merupakan landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan

teknis analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan, meliputi deskripsi/identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan.

Bab V merupakan Penutup dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kampung

Istilah Kampung berasal dari bahasa melayu, kampung, yang berarti desa kecil, atau bagian dari desa yang memiliki sekumpulan rumah. Di Aceh ada istilah gampong, yang memiliki arti sama dengan kampung. Kampung merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. Kumpulan sejumlah kampung disebut dengan desa. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Kampung pada dasarnya merupakan ciri kehidupan bermukim di Indonesia, yang dapat dianggap sebagai tatanan permukiman tradisional Indonesia sebelum masuknya perencanaan permukiman modern. Kampung dapat menjadi sumber peradaban, kreativitas maupun budaya kota karena kondisi dan keterbatasan yang ada. Lokalitas yang terkandung pada tatanan kampung akan memberi karakter bagi pembentukan semangat urbanisme baru yang sesuai dengan karakter masyarakat, bersumber pada ideologi bermukim yang berkelanjutan. (Nugroho, 2009).

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan

Provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kedepan.

Dalam pengaturan mengenai pemerintahan kampung telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah desa tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, termasuk pengawasan representatif terhadap peraturan kampung. (Jayadinata, 2006).

2.2 Karakteristik Perkampungan

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
2. Hubungan lebih bersifat homogen.
3. Struktur masyarakat bersifat homogen.
4. Tingkat mobilitas sosial rendah.
5. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit ekonomi.

Adapun sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan kampung yaitu: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk,

lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat yaitu produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri (Nurman, 2015). Secara psikologis masyarakat kampung cenderung suka curiga terhadap orang luar namun demikian masyarakat kampung dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

2.3 Pemerintahan Kampung

Kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu ke Bupati.

3. Kampung dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan kampung, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
5. Di kampung dibentuk lembaga kemasyarakatan kampung lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan kampung dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung.
6. Kampung memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan kampung, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman kampung.
7. Berdasarkan hak asal-usul kampung yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. (Nurman, 2015, h. 234).

Pemerintah kampung merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Susunan pemerintahan kampung terdiri dari Pemerintah kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat kampung yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPK adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan kampung.

2.4 Dasar-dasar Pembangunan Kampung

Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung telah menjadi dua istilah yang sering dicampur adukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda.

Sumarja, menyebut bahwa pembangunan masyarakat kampung (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan

desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kampung meliputi:

1. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas pada daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan, pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. (Rosfa Nur Azizah, 2017).

Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang

meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan perkampungan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.

2.5 Otonomi

Pelaksanaan *desentralisasi* akan membawa efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek bahasa, tingkat pendidikan dan lainnya.

Otonomi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Kampung adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, kampung telah memiliki sistem

dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia.

Prinsip utama otonomi adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintah desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong-royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan.

Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengerucutnya kebijakan otonomi daerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli desa. hal ini merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar desa dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai bukti keberhasilan praktik pengelolaan sumber daya hutan memberi bukti otonomi desa dapat di proses melalui keandalan sosial dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

2.6 Perencanaan Pembangunan Kampung

Pembangunan perkampungan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah perkampungan umumnya miskin.

Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat rt/rw, dusun, dan desa.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.

Kebijaksanaan pembangunan wilayah perkampungan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakanaksanaan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. (Rahardjo Adisasmita, 2013). Dalam hal ini termasuk pula penciptaan kondisi yang menjamin keberlangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, dan pelestarian lingkungan hidup.
2. Kebijakanaksanaan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dalam hal ini pengembangan ekonomi rakyat paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah lembaga ekonomi (misalnya melalui kelompok tani). Harus dilakukan terhadap:
 - 1) Akses terhadap sumber daya
 - 2) Akses terhadap teknologi (menggunakan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien)
 - 3) Akses terhadap pasar, di mana produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi.
 - 4) Akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi.
3. Kebijakanaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Kebijakanaksanaan ini misalnya: jaminan pengaman sosial (JPS) yang memberikan bantuan uang kepada orang miskin,

peraturan yang melindungi terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi pelayanan kepada penduduk miskin.

Perencanaan pembangunan perkampungan di suatu daerah (kabupaten) dilakukan untuk mengatasi masalah yang berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia pertanian yang belum optimal
2. Pembinaan petani oleh instansi teknis yang belum optimal
3. Produktivitas lahan rendah
4. Kesuburan tanah semakin berkurang
5. Kerusakan lingkungan.

Strategi dan arah pembangunan desa di Indonesia. Dapat diterangkan bahwa strategi pembangunan masyarakat desa adalah:

1. Sesuai dengan strategi pembangunan nasional.
2. Dilakukan secara bertahap.
3. Tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
4. Dalam pelaksanaannya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis harus dapat terbina dan terpelihara.
5. Mampu mengubah struktur perekonomian desa
6. Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat.

7. Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk.
8. Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut beberapa prinsip yang telah ditetapkan.
9. Masyarakat desa harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
10. Dapat memanfaatkan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam.
11. Dilakukan melalui tahapan desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada dengan pelaksanaan secara komprehensif (menyeluruh) dan koordinatif. (Jayadinata, 2006, h. 89)

Untuk itu perencanaan pembangunan agar diarahkan untuk mengembangkan

1. Pengembangan komoditas pertanian unggulan terpadu
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Pelestarian lingkungan.
5. Pengembangan industri kecil dan kerajinan.

Dari hasil analisis keadaan kampung diperoleh petunjuk tentang:

1. Masalah yang dihadapi.
2. Potensi yang dapat digali dan dikembangkan.
3. Perkembangan desa yang bersangkutan.

2.7 Pembangunan Kampung dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan kampung tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan kampung dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten.

Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat pembangunan di desa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah dan rencana jangka panjang dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berada dalam koordinasinya,

sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, aspirasi serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJM yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah atau kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT/RW/dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

1. Di tingkat masyarakat di lakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan Penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT/RW/dusun.
2. Di tingkat kampung dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan di biyai APBD Kampung.
3. Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
4. Di prioritas usulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan kampung dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di

tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut di antaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.

Pembangunan kampung tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten.

2.8 Konsep Kemiskinan

2.8.1 Pengertian Kemiskinan

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian

tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Meskipun miskin bukan kenyataan baru dalam masyarakat, namun sampai saat ini definisi kemiskinan masih bersifat problematik karena sifatnya yang begitu rumit dalam beberapa tataran variabel pengukuran. Belum ada definisi baku yang dapat diterima bersama oleh para ahli seputar kemiskinan. Namun dengan memperhatikan definisi-definisi teoritis yang dikemukakan di atas, maka definisi operasional dari kemiskinan yang diutarakan disini adalah kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk dapat hidup layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan hak-hak dasar mereka.

Menurut BAPPENAS (2004), hak-hak dasar masyarakat miskin ini yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) beberapa daerah di Indonesia di antaranya: (1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak untuk memperoleh rasa aman; (4)

hak memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) yang terjangkau; (5) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) hak untuk memperoleh akses atas kesehatan; (7) hak untuk memperoleh keadilan; (8) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak untuk berinovasi, serta (1)

hak untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan yang baik.

Orang yang setidaknya bisa memenuhi hak-hak dasar tersebut dianggap tidak miskin, sedangkan yang tidak dapat memenuhinya maka dapat dikategorikan miskin. Meskipun pada kenyataannya, untuk dapat hidup layak berbeda untuk tiap individu tergantung pada usia, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan juga memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar, serta kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan menggelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial.

Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kehidupan, sosial, dan budaya.

2.8.2 Ukuran Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan

minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan kata lain, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *head count index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *head count index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut "batas garis kemiskinan", yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan (*non food line*).

Ukuran kemiskinan yang dipakai oleh Bank Dunia, yaitu mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari (Sumodiningrat, 2002). Sedangkan ukuran kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan kurang dari 1 (satu) dolar AS per hari untuk

warga perkotaan dan 80 sen dolar AS per hari bagi warga pedesaan.

2.8.3 Penyebab Kemiskinan

Nasikun (2001) menyoroti beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy Induces Processes*. Proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
2. *Sosio Economic Dualism*. Yakni negara eks koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang subur dikuasai para *petani skala besar dan berorientasi ekspor*.
3. *Population Growth*. Perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa **pertambahan penduduk** seperti deret ukur, sedang **pertambahan pangan** seperti deret hitung.
4. *Resources Management and The Environment*. Adanya unsur **mismanagement sumber daya alam dan lingkungan**, seperti manajemen pertanian yang asal tebang dan dapat menurunkan produktivitas.
5. *Natural Cycles and Processes*. Yakni kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan

terjadi banjir, namun jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.

6. *The Marginalitation of Woman*. Adalah peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih rendah ketimbang laki-laki.
7. *Culture and Etnik Factor*. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot biaya mahal.
8. *Exploitative Intermediation*. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*. Yakni suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International Processes*. Yakni bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor penyebabnya, maka dibedakan atas : kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah

kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Teori yang berbasis pada sosioantropologis melihat kemiskinan sebagai akibat faktor kultural yang menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Sedangkan yang berbasis ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat faktor natural seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan faktor struktural seperti kesenjangan kepemilikan faktor produksi, rendahnya pembentukan modal masyarakat dan rendahnya perangsang untuk penanaman modal.

2.8.4 Pengentasan Kemiskinan

Miskin dalam konteks fiqh dibedakan dengan faqir. Keduanya mewakili kelompok *dhu'afa'* (lemah/papa). Faqir adalah kelompok yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Walaupun ia punya keduanya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya ia punya 2 dinar kebutuhannya 10 dinar.

Miskin adalah kelompok yang memiliki harta dan mata pencaharian, namun belum mencukupi sepenuhnya kebutuhannya. Misalnya ia punya 7 dinar kebutuhannya 10 dinar.

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan. Para sosiolog mengkajinya dengan menggunakan istilah kelas, stratifikasi, dan marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-masalah sosial lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial masyarakat secara umum.

Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller, kemiskinan adalah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Para ekonom berpandangan bahwa kemiskinan didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. (Nur Khoirin, 2014).

Kemiskinan sebagai bagian dari sunnatullah, akan tetap ada sepanjang sejarah kemanusiaan. Allah SWT menciptakan alam ini dalam bentuk yang berpasang pasangan. Dia menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, dan tentunya kaya dan miskin dan seterusnya, karena pada hakikatnya manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera bukan berarti manusia harus kaya, akan tetapi mampu mengarungi hidup dengan saling membutuhkan dan membuang jauh-jauh kesusahan dan kemelaratan, karena inilah kehidupan yang sebenarnya. Usaha ini tidak akan sia-sia karena Allah SWT berfirman:

Dalam QS Asy-Syuura: 12 Allah SWT berfirman:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS.Asy-Syuura [42]:12).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan rizki-Nya bagi orang yang dikehendaki-Nya. Arti dari yang dikehendaki ini sangat luas sekali, salah satu arti dari orang yang dikehendaki adalah orang yang mau berusaha. Artinya

dia selalu berusaha mencapai kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan firman Allah SWT:

Dalam QS. Ar-Ra'd:11 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra'd [13]:11)

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimplikasi jamak pada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Sebagai suatu bangsa yang penduduknya kurang lebih 90% beragama Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk di dakwahkan. Karena kemiskinan umat seperti itu cenderung diartikan orang merupakan konsekuensi dari kepegangan agama Islam. (Yusuf Qardhawi, 1995).

Terdapat pula petunjuk salah satu isyarat yang sangat membantu untuk mengungkap hal-hal yang menimbulkan kemiskinan, yakni satu bentuk permohonan yang berbunyi antara lain: “Aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, ketidihan hutang dan dikuasai sesama manusia. (Ali Yafie, 1994).

Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.
2. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata

Dari dulu hingga sekarang, manusia memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap kemiskinan, di antaranya adalah:

1. Sikap Golongan Pemuja Kemiskinan

Termasuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang zahid, pendukung pertapaan, dan kaum sufi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari, kemiskinan dianggap sebagai bagian dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba pilihan Nya agar hati sang hamba tetap terkait dengan akhirat, berpaling dari dunia, selalu berhubungan dengan Allah, dan pengasih kepada sesama. Dengan demikian, merek tidak seperti orang kaya yang angkuh dan congkak. (Yusuf Qardhawi, 2002).

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa alam ini semuanya rusak, dunia ini jelek dan hanya merupakan bencana (bala'). Kebaikan tertinggi ada pada kerusakan

dan kehancuran alam ini sesegera mungkin, atau setidaknya, mempercepat durasi domisili manusia di alam raya ini. Dengan demikian orang yang berpikir normal harus tidak memperdulikan sebab-sebab yang bisa memperoleh kehidupan layak dan tidak perlu berinteraksi dengan manusia lain kecuali hanya untuk sekedar hidup.

Dalam agama penyembah berhala dan agama-agama samawi, ada orang yang mengakui pandangan di atas serta mendewakan dan menyucikan kemiskinan. Sebab, menurutnya, kemiskinan merupakan sarana yang baik untuk menyiksa jasad, dan menyiksa jasad merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas ruh. Pandangan seperti ini juga banyak beredar dikalangan sufi muslim sebagai pengaruh dari kebudayaan Islam dan berhasil mengkeruk kejernihannya, seperti Mistisisme India, Manikeisme Persia dan Monastisisme Nasrani serta aliran-aliran lain yang masuk dan bersentuhan secara langsung dengan kehidupan muslim.

2. Sikap Kaum Fatalis

Berbeda dengan kelompok yang pertama, kelompok ini memandang kemiskinan sebagai kejahatan dan malapetaka. Kemiskinan yang diderita orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya merupakan kehendak dan takdir Tuhan. Jika Allah berkehendak, dia bisa menjadikan semua manusia menjadi orang kaya, serta memberikan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun. Tetapi

Allah sengaja ingin mengangkat sebagian orang di atas orang lain dan memberi serta membatasi rizki untuk orang yang dikehendaki, untuk menguji mereka. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan-Nya. kemiskinan merupakan ketentuan samawi yang tidak mungkin dipecahkan dan diatasi. Solusi penghapusan kemiskinan yang diberikan oleh kelompok ini hanya sebatas pemberian nasihat.

3. Sikap Pendukung Kemurahan Individu

Kelompok ini berpendapat sama seperti kelompok kedua bahwa kemiskinan merupakan kejahatan dan malapetaka serta termasuk persoalan yang harus dipecahkan. Akan tetapi penyelesaian yang mereka usulkan tidak terbatas pada pemberian nasihat kepada kaum miskin agar mereka rela menerima nasibnya, tetapi lebih maju satu langkah yaitu, mereka juga mengingatkan orang-orang kaya agar berbuat baik dengan bersedekah kepada kaum fakir. Kelompok ini menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah jika menerima seruan moral tersebut.

Sebaliknya, mereka mengancam orang-orang kaya dengan azab neraka bila bersikap kasar dan berlaku kejam terhadap kaum miskin.

4. Sikap kapitalisme

Kelompok ini melihat kemiskinan sebagai salah satu musibah dan problem kehidupan, namun yang bertanggung jawab untuk mengatasinya adalah orang

miskin itu sendiri. Dalam hal ini, masalah kemiskinan dianggap sebagai suratan nasib.

Masyarakat atau pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengatasinya. Setiap orang bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Kelompok ini adalah kelompok Qarun, salah seorang dari kaum Nabi Musa yang kaya raya tetapi sombong. Mereka menganggap bahwa harta yang berhasil mereka kumpulkan adalah semata-mata atas kecerdasan dan kecerdikan mereka.

5. Sikap Sosialisme

Kelompok ini berkeyakinan bahwa upaya menghapuskan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa menghilangkan aghniya' (orang-orang kaya) dan menyita harta mereka, dan membatasi kepemilikan harta, dari manapun sumber penghasilannya. Untuk mencapai ini diperlukan suatu pendekatan terhadap kelas-kelas lain dan berusaha membangkitkan rasa iri dan dengki serta membangkitkan api permusuhan diantara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Sehingga pada akhirnya, kelompok mayoritaslah yang menjadi pemenang, yaitu kaum buruh yang mereka sebut sebagai kaum proletar.

Oleh karena itu, ada beberapa sarana untuk mengatasi kemiskinan yaitu:

1. Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan

memanfaatkan rezeki pemberian Allah. Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.

Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan dan juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.

2. Jaminan sanak famili yang berkelapangan.

Islam memiliki prinsip orisinil di dalam syariatnya, ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya yaitu bekerja dan berusaha. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga.

Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu.

Dengan prinsip ini, hubungan antar famili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.

3. Zakat.

Pada beberapa kesempatan Rasulullah Saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat memiliki fungsi sosial yaitu sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial.

4. Derma sukarela.

Islam selalu berusaha mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana. Sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

5. Jaminan Baitul mal dengan segala sumbernya.

Dalam sistem Islam, sumber dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya

terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul mal dapat dipergunakan.

Harta Baitul mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum. Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Al-Quran menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut.

1. prinsip *ta'āwūn*, yakni prinsip kerja sama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya.

Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak-pihak terkait.

Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal.

Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku. Karena itu kerja sama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin mutlak diperlukan. Bentuk *ta'āwūn* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.

2. prinsip *syūrā*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan.

Prinsip *syūrā* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan

kemiskinan tanpa social capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip *syūrā*. Sebab prinsip *syūrā* ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syūrā* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian dana bantuan, membangun infrastruktur di pedesaan, mengembangkan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan oleh pemerintah

memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk di Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan.

Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya.

2.9 Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Sedarmayanti, 2014). Strategi merupakan parameter-parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam

lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan (Panji Anoraga, 2004).

Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari bisnis. (Child, 1972). Strategi memperhatikan arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga memperhatikan posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan keunggulan kompetitif, yang berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang (Jajuk Herawati dan Sunarto, 2004). Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep tersebut adalah: (Sedarmayanti, 2014).

1. Distinctive competence

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan

pesaingnya. Menurut Day dan Wensley (1998) identifikasi distinctive competence dalam organisasi meliputi :

- 1) Keahlian tenaga kerja.
- 2) Kemampuan sumber daya.

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

2. Competitive advantage

keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah, bukan keduanya. Berdasarkan prinsip ini porter menyatakan terdapat tiga strategi generik, yaitu:

1) strategi diferensiasi

adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga.

2) strategi keunggulan biaya rendah

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.

3) strategi fokus

Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

Jadi, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan alokasi sumberdaya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumberdaya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal.

Strategi merupakan perspektif, dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi.

2.10 Strategi Penciptaan Wirausaha Baru

Penciptaan wirausaha baru, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, karena ternyata sangat sulit untuk mencari orang yang berjiwa *entrepreneur*. *Entrepreneur* sering diartikan sebagai orang yang mengambil resiko menanamkan uangnya untuk penemuan-penemuan baru (*innovation*), sedangkan *entrepreneurship* lebih menekankan jiwa kewirausahaan (kata sifat). Schumpeter menyebut *entrepreneur* sebagai orang yang :

1. Memperkenalkan produk-produk baru sebagai hasil kreasi/inovasinya.
2. Menciptakan metode produksi baru.
3. Menemukan pasar baru.
4. Menemukan bahan baku baru.
5. Menemukan organisasi baru yang lain dari yang sudah ada.

Pendapat lain, entrepreneur diartikan sebagai orang :

1. Yang imajinatif
2. Mampu melihat peluang
3. Yang inovatif, dan inovasinya digunakan untuk kemajuan masyarakat
4. Yang memiliki ciri-ciri antara lain :
 - (a) Percaya diri
 - (b) Berorientasi pada tugas dan hasil
 - (c) Pengambil risiko
 - (d) Punya jiwa kepemimpinan
 - (e) Keorisinilan ideide
 - (f) Berorientasi ke masa depan.

Dari uraian di atas tentunya tidaklah mudah mencari orang yang memiliki ciri-ciri di atas. Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan di Indonesia (seperti yang telah disebutkan di atas), mayoritas pengusaha yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang usaha (bisnis). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa kultur (budaya)

berwirausaha suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Kultur beberapa suku di Indonesia (seperti suku Thionghoa, suku Minang) memang mengagungkan profesi wirausaha sehingga banyak wirausaha tangguh yang berasal dari suku tersebut. Namun secara umum kultur masyarakat Indonesia (baca: masyarakat Jawa) masih mengagungkan profesi yang relatif “tanpa resiko” (misalnya menjadi pegawai negeri, ABRI atau bekerja di perusahaan besar). Usaha penciptaan wirausaha baru yang tangguh ini akan lebih baik jika dilakukan terhadap lulusan perguruan tinggi yang telah memiliki dasar keilmuan dan intelektualitas yang tinggi. Hal ini didasari oleh kondisi persaingan usaha di era globalisasi yang menuntut kemampuan seorang wirausaha yang benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi. Salah satu pola pengembangan wirausaha yang tangguh dan unggul adalah dengan memberikan disamping melalui perguruan tinggi, juga dapat melalui pelatihan dan magang yang didukung oleh fasilitas / akses teknologi, manajemen, pasar, modal, serta informasi (baik yang umum maupun yang spesifik), melalui Inkubasi bisnis.

2.11 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia

sehingga di sini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT. Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain, yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik beratkan pada usaha mencapai tujuan; kedua, beriman kepada ke-Esaan Allah; dan ketiga, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).

Beberapa konsep tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam yaitu,

1. M.Umer Chapra, menurut ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.
2. M. Akram Kan, secara lepas mengartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasikan sumber daya alam) (Nasution, 2006).

Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Hakim, 2010).

Tujuan dari sistem Islam sangat berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Hal ini tidak memerlukan pembahasan secara keseluruhan dan hanya terkait sasaran-sasaran yang secara langsung relevan dengan kehidupan ekonomi. Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktifitas sesuai kebebasan sebagai manusia dengan syarat mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil. Ekonomi dalam sistem Islam memiliki tiga tujuan, yaitu:

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia
- (2) Pembangunan ekonomi (dengan maksud untuk mempertahankan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan

penduduk yang berkembang dan juga untuk memperoleh identitas yang kuat agar mampu mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya dan membantu identitas serupa dalam tugas manusia yang sama)

- (3) Mencegah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

2.12 Konsep Pembangunan dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Titis Istikomah, 2015).

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi (Ismail Nawawi, 2009).

Umer Chapra yang dikutip oleh Mustava Edwin, ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa

menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia (Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia.

Dalam QS Al-Anfal 53 Allah SWT berfirman:

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”* (QS. Al-Anfal [8] : 53)

Dari penjelasan atas di atas bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk mengubah nya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan

oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam.

Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tenteram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.

Pembangunan Islam adalah pembangunan insyaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diajarkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerja sama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam QS Al-Maidah 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al-Maidah [5] : 2)

Ayat Diatas menjelaskan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

1. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.
2. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
3. Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
4. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.

5. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa

Kegiatan dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, sebagai berikut:

1. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
2. Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
3. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
4. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
5. Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
6. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat.
7. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi

dengan menggunakan nilai-nilai Islam, (Sa'adatina Khuzaimah, 2015) antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) diakhirat. Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian dan pemberdayaan.

2. Prinsip Nubuwah

Prinsip nubuwah merupakan prinsip ekonomi kenabian, maksudnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia dan merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di amanahkan untuk memberi teladan dan membimbing umat Islam sesuai dengan ajaran Allah.

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah

kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Seorang pelaku ekonomi harus memiliki kecerdasan dan wawasan agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- 1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah. (Ismail Nawawi, 2009).
- 2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Wujud keseimbangan juga terdapat dalam keseimbangan hak individu dan kolektif. Hak individu adalah hak yang boleh dimiliki secara sendiri, sedangkan

hak kolektif adalah hak yang harus dimiliki atau diambil manfaatnya oleh banyak orang.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan)

5. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. Prinsip keadilan menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan tiga hal, yaitu: keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan hukum.

1) Keadilan tukar-menukar

Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

2) Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan yang terdapat di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta pembagian barang maupun jasa secara merata.

3) Keadilan sosial dan hukum

Keadilan sosial merupakan perilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan hukum merupakan perilaku manusia dalam mengatur hubungan yang seimbang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

6. Prinsip Masalah dan Manfaat

Prinsip Masalah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. (Ika Yunia Fauzia, 2014).

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan, di mana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung.

Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan sebuah instansi atau lembaga, di mana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringankan bebannya, sehingga dapat terwujudnya kegiatan yang bermanfaat untuk semua pihak.

2.13 Penelitian Terkait

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rosnawati pada tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Islam*”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program

alokasi dana desa yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Way Kanan dalam perspektif Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah pada tahun 2017 berjudul “*Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara)*”. Dalam deskripsi tersebut penulis membahas mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat didalamnya, dan menganalisis alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Titis Istikomah pada tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 – 2010 ditinjau dari persepsi anggota KSM terhadap program serta perbedaan pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda pada tahun 2014 berjudul *“Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)”*. Efek dari pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat di desa Geuceu Komplek dikatakan efektif, karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya Ibu-ibu yang berprofesi sebagai IRT, yang dilihat dari minat dalam partisipasi kegiatan pelatihan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Wulandari pada tahun 2017 berjudul *“Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam(studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2016 di kecamatan padang cermin dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proposrsi untukmasing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Rosnawati (2015)	Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di dalam Perspektif Islam	Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Kabupaten Way adalah Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar , Kualitas Sumber Daya Manusia, partisipasi Masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju.
2	Rosfa Nur Azizah (2017)	Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Candimas	Pembangunan infrastruktur Desa Candimas yang telah dilakukan kurangnya optimalisasi. Hal ini dilihat dari program pembangunan yang dilakukan terdapat satu program saja

		Kabupaten Lampung Utara)	yang berjalan optimal yaitu program pembuatan jalan.
3	Titis Istikomah (2015)	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)	Berdasarkan hasil analisis tentang persepsi anggota KSM terhadap pinjaman bergulir menunjukkan bahwa mereka menganggap jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lama (65,63 %) dan bunga pinjaman juga berat (79,69 %). Sebanyak 54,76 % berpendapat bahwa pinjaman bergulir dapat membantu modal usaha, 52,38 % responden berpendapat membantu kelancaran usaha dan 52,38 % responden berpendapat bahwa pinjaman dapat meningkatkan usahanya. Persepsi tersebut menunjukkan

			bahwa pinjaman bergulir membantu anggota KSM dalam mengembangkan usaha mereka
--	--	--	---

Tabel 2.1- Lanjutan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
4	Okta Rosalinda (2014)	Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)	Secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Dan adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD juga diatur Peraturan Bupati Kabupaten Jombang dimana ada pos-pos anggaran dalam

			<p>pengalokasiannya. Sehingga pemanfaatan dana ADD menimbulkan kepatenan penerapan besaran nominal penganggaran di setiap pos-pos anggaran. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa</p>
5	Anita Wulandari (2017)	<p>Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)</p>	<p>Pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2016 di kecamatan padang cermin dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya</p>

			dikarenakan pembagian proposrsi untukmasing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif.
--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan analisis strategi program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan.

Selain menggunakan penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan.

3.2 Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya atau diperoleh melalui wawancara para aparaturnya dan beberapa masyarakat di kampung Tearangun. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para masyarakat setempat dan pemerintah Kampung Tearangun. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Data Profil Kampung. Data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Kantor Keuchik Kampung Terangun.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti. Subjek penelitian adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Widodo, 2011). Key Informan adalah orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Keuchik	1	Key Informan
2	Sekretaris	1	-
3	Kaur Umum Dan Pembangunan	1	Key Informan
4	Bendahara	1	Key Informan
5	Kepala Dusun	4	Key Informan
6	Anggota Masyarakat	2	Key Informan
	Total	10	

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menyimpulkan data yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu (Haris Herdiansyah, 2012). Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah para aparatur desa yang bertanggung jawab atas pembangunan kampung dan masyarakat Kampung Terangun Diantaranya Kaur Pembangunan, Ketua Dusun, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat.

3.3.2 Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya kamera, video tape, dan audio tape recorder. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Kampung Terangun Kecamatan Terangun, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

3.3.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan juga transkrip. Adapun data yang diperoleh dari subjek penelitian ini adalah dengan meminta data langsung pada subjek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, meliputi data tentang pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan dari aparat desa yang terlibat.

3.5 Teknis Analisi Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang

strategi program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.5.1 Editing

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi diharapkan masalah teknis atau konseptual tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran analisis.

3.4.2 Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. (Jhonatan Sarwono, 2006).

Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan editing, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Kampung Terangunn.

Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang Strategi Program Pembangunan Kampung dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Terangun.

3.4.3 Analyzing

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

Menurut penulis analyzing yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Strategi Program Pembangunan Kampung dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Terangun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Kampung

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kampung Terangun

Kampung terangun kecamatan terangun kabupaten gayo lues berdiri tepatnya pada tahun 1958. Secara geografis, kampung terangun berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian berbatasan dengan wilayah kecamatan terangun. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tepat hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. (Data Profil Kampung)

Musyawarah (Mufakat) di Dusun Atu Rongka beberapa tokoh adat dimasa itu ada yang datang dari Aceh Barat yang bernama M.Amin dan Junet dan ada yang datang dari Aceh Selatan yang bernama Tjam, daidah dan Banta dan ada yang datang dari jabo yang bernama Tgk. Rahman. Para tokoh inilah pertama kali musyawarah dan mengusulkan Atu Rongka ingin diganti menjadi Kampung Terangun, kemudian dipilih pejabat Se Gampong yang masa itu disebut dengan Reje. Pada Tahun 2005 Terangun terpecah menjadi dua kampung yaitu Kampung Terangun dan Kampung Reje Pudung, Kampung Terangun terbagi menjadi empat dusun yaitu:

1. Dusun Sena Rebung

2. Dusun Baro Renah
3. Dusun Kampung Jawa
4. Dusun Blang Jorok (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Terangun).

4.1.2 Keadaan Geografis Kampung Terangun

4.1.2.1 Batas Wilayah

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kampung Jabo
 Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kampung Pasir
 Sebelah Barat, berbatasan dengan Kampung Reje
 Pudung
 Sebelah Timur, berbatasan dengan Kampung
 Rempelam Pinang

4.1.2.2 Luas Wilayah

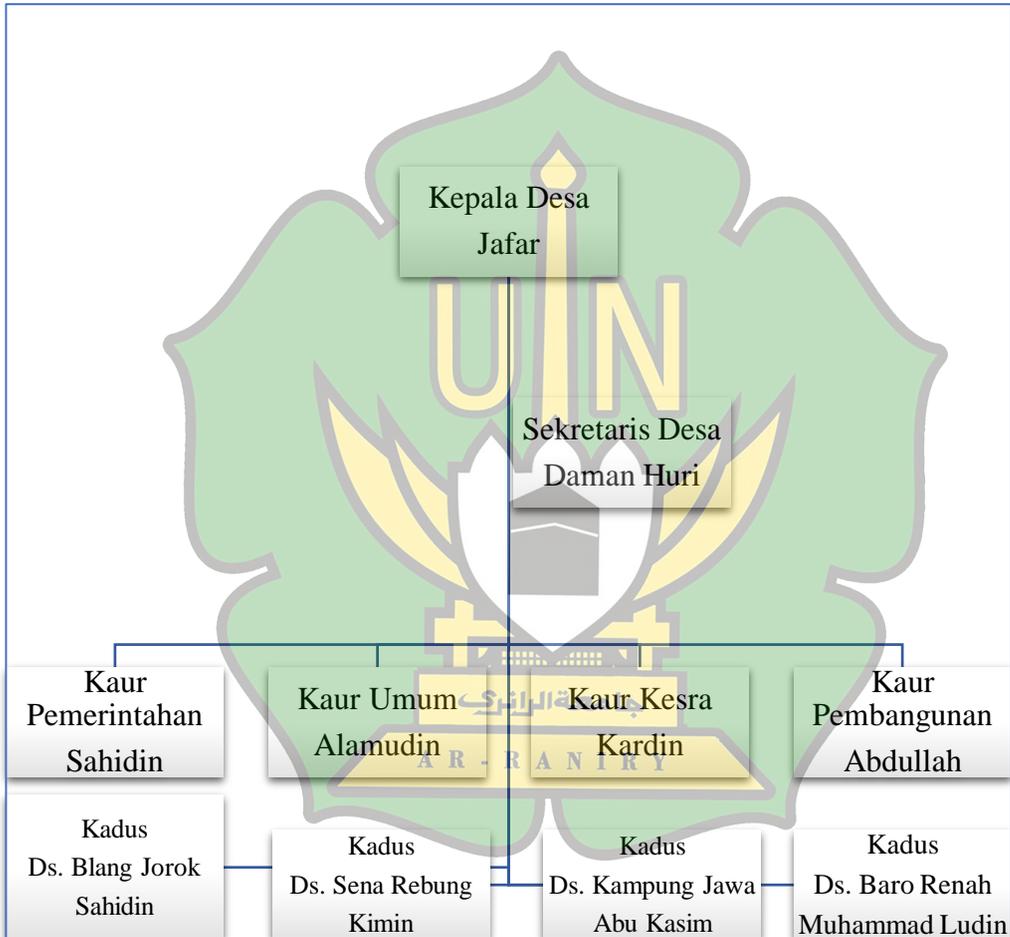
Luas wilayah Kampung Terangun secara keseluruhan
 124,80 Ha yang terdiri dari:

Permukiman	: 9,50 Ha
Persawahan	: 8 Ha
Perkarangan	: 2 Ha
Perkebunan	: 99,30 Ha
Perkantoran	: 2 Ha
Fasilitas Umum	: 4 Ha (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Terangun).

4.1.3 Struktur Perangkat Kampung

Struktur Perangkat Kampung Terangun Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues

Sumber : Kantor Pengulu Kampung Terangun, (2015)



4.1.4 Visi Dan Misi Kampung Terangun

Visi : Membangun Insan yang Cerdas, Kreatif dan Mandiri yang Berbasis Pada Usaha- usaha Pertanian dan Perkebunan”

Misi :

1. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau informal yang sudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
2. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan yang cerdas, Kreatif dan mandiri.
3. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan mengoptimalisasikan sektor pertanian dan perkebunan baik tahap produksi maupun pengelolaan hasil produksi
4. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadinya keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya.

4.1.5 Kependudukan

4.1.5.1 Jumlah Penduduk

Penduduk kampung Terangunn terdiri dari 618 jiwa yang terdiri dari 324 orang laki laki, 294 orang

perempuan. Dari keterangan diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di kampung Terangun berjumlah 618 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan, serta semua penduduk kampung terangunn menganut agama Islam.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kampung Terangun

No.	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	324
2	Perempuan	294

Sumber : Kantor Pengulu Kampung Terangun

4.1.5.2 Data Tingkat Kemiskinan Kampung Terangun

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis suatu masyarakat dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau R paling N tidak mempersulit realisasi kesejahteraan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin 30 KK sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sejumlah 34 KK. Berdasarkan hasil wawancara terjadinya perubahan data jumlah penduduk miskin desa Terangun pada tahun 2016 di karenakan jumlah penerima RASKIN (Beras Bersubsidi) meningkat, pada

tahun 2015 sejumlah 30 KK sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 34 KK.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Miskin Kampung Terangun

Tahun	Jumlah
2015	30 KK
2016	34 KK

Sumber : Kantor Pengulu Kampung Terangun

4.1.5.3 Kondisi Ekonomi Kampung Terangun

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, dimana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya selalu berbeda yang bedanya menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian sebagian besar warga Desa Terangun adalah petani dan buruh. Mereka mengelola lahan pertanian yang masih mendominasi area wilayah mereka. Kehidupan warga Kampung Terangun sebagian besar didominasi dengan pola kehidupan masyarakat tani padi (pertanian) dan sere wangi sebagai potensi besar Kampung Terangun.

Tabel 4.2
Daftar Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Terangun

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	342 Orang
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37 Orang
3.	Pedagang Keliling	1 Orang
4.	Montir/bengkel mobil	1 Orang
5.	Perawat Swasta	1 Orang
6.	Dosen Swasta	2 Orang

Sumber : (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Terangun).

4.1.5.4 Kondisi Pendidikan Kampung Terangun

Meskipun kekayaan alam Desa Terangun sangat beragam dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, namun penduduknya masih tergolong kurang dalam perekonomian. Banyak anak-anak dan remaja yang hanya bisa sekolah sampai SMP saja dikarenakan himpitan biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar sehingga banyak yang memilih untuk bekerja menjadi buruh atau merantau ke luar kota dan tidak melanjutkan ke SMA. Berikut rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk Kampung Terangun:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah Orang
1	Tidak Tamat SD	43 Orang
2	SD/MI	47 Orang
3	SMP/MTs	37 Orang
4	SMA/MA	137 Orang
5	S1/Diploma	94 Orang

Sumber : (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Terangun).

Sebagian besar penduduk Desa Terangun tidak tamat SD dengan jumlah 150 orang tamat SD dengan jumlah 69 orang, di ikuti penduduk yang tamat SMP sekitar 28 orang. Sedangkan lulusan sarjana (S1) hanya 50 orang, serta banyak yang putus sekolah, ini

menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kampung terangun terhadap pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang berada pada kampung terangun diantaranya:

1. 1 TK/PAUD
2. 1 SD Negeri

4.2 Program Pembangunan Yang Sudah Berjalan

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pembangunan, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam

bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sektor Jalan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2015, Pemerintah Kampung Terangun telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan di dusun-dusun.

Dalam wawancara dengan Bapak Abdulah, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan slogan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Kampung Terangun di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Kampung Terangun.”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Terangun, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kampung Terangun menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Kampung Terangun sendiri berharap masyarakat Terangun terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Kampung Terangun mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari

program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pembibitan, dll. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah kampung Terangun mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Strategi Program Pembangunan kampung dalam Pengentasan Kemiskinan

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat

dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

Dalam wawancara dengan Bapak Abu Kasim mengatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Abu Kasim pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*) Menurut Anwas (2014).

Pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut- sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada

keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Terangun untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas, kini program pembangunan di Desa Terangun mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa Terangun sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Terangun terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal

pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di Desa Terangun hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Menurut Chabib (2015) Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Beberapa strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas kampung terdiri dari:

1. Perbaikan akses jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala Nasional, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor. Kondisi pembangunan di Kampung Terangun saat ini memang belum berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belum sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa.

Pemerintah Kampung Terangun melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa ADD. Pemerintah Kampung Terangun dalam pemanfaatan dana desa secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah kampung Terangunn dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat kampung, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik kampung, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan kampung, jalan setapak, pembuatan selogan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2015, Pemerintah Kampung Terangun telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan dan pembangunan jalan di dusun-dusun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Terangun di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Desa Terangun”

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Terangun, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan

atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kampung Terangun menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap kampung, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Kampung Terangun sendiri berharap masyarakat Terangun terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah

penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Program ini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Kampung Terangun mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah kampung Terangun mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

4. Menciptakan Program Kelompok Petani

Kelompok tani sebagai lembaga media kerjasama merupakan wadah dan sarana dalam membangun relasi untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan usahatani yang dijalankan anggotanya. Selain itu, untuk menjalankan perannya sebagai wahana kerjasama bagi anggota kelompok, pengurus kelompok harus mampu memperkuat, memperlancar dan sekaligus mendorong terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan, baik antar anggota maupun dengan pihak lain (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012).

Pemerintah Kampung Terangun juga menciptakan beberapa kelompok petani yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen tersebut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan serta memberikan fasilitas alat-alat pertanian yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk dipinjamkan kepada kelompok petani tersebut.

Peran kelompok tani sebagai penyedia unit produksi adalah kemampuan kelompok dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan anggotanya, sehingga mampu meningkatkan skala ekonomis usaha yang dijalankan oleh kelompok maupun anggota kelompok dengan menjaga kuantitas maupun kontinuitas.

Peran kelompok tani sebagai wahana unit produksi ini dilihat dari indikator pengambilan keputusan dalam pengembangan produksi diperoleh skor sebesar 3,40 dengan katagori “Berperan”

Skor tersebut menggambarkan bahwa kelompok tani telah beberapa kali melakukan kegiatan pengembangan produksi yang menguntungkan dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi, dan sumberdaya alam lainnya, informasi mengenai kegiatan tersebut didapatkan melalui kegiatan penyuluhan, interaksi antar sesama kelompok tani, serta para pedagang pupuk dan juga alat pertanian.

5. Mendirikan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung)

BUMDes sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Dalam wawancara dengan bapak Alamudin, untuk pembangunan desa terdapat rencana jenis usaha yang akan dikembangkan melalui BUMK diantaranya:

1. Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Kampung Terangun. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kontribusi BUMK terhadap masyarakat Kampung Terangun memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain:

1. Pinjaman Modal

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMK yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMK kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 3 bulan saja.

Adanya peminjaman modal pada BUMK ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Hal ini sejalan dengan pendapat Rondinelli (1983) mengorganisir lembaga keuangan yang mudah diakses dapat meningkatkan arus modal dan simpanan di kalangan masyarakat pedesaan, sehingga kedudukannya sangat penting agar menciptakan sistem pemasaran yang stabil bagi petani. Namun disamping itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal di BUMDes dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha.

2. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Tidak hanya kepada masyarakat, kontribusi yang diberikan BUMDK di Kampung Terangun bagi PAK masih kurang. Seperti keterangan salah satu informan yang merupakan ketua BUMK menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan BUMK jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Namun pada kenyatannya kontribusi yang di berikan BUMK terhadap PAK kampung pada tahun 2017 hanya sebesar 5% saja ini dikarenakan BUMK masih dalam tahap pengembangan dan juga pengurus maupun pemerintah desa memfokuskan kepada pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMK maupun membuka unit usaha yang baru seperti unit usaha pasar desa. Ponimin yang merupakan Kaur Keuangan di Kampung menerangkan bahwa, BUMK telah dapat berkontribusi terhadap PAD kampung hanya saja kontribusi itu belumlah besar atau belum maksimal seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Kontribusi yang diberikan BUMK pada tahun 2017 hanya sebesar 5% saja sedangkan pada tahun sebelumnya BUMK belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kampung”.

Disisi lain, usaha BUMK dalam memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada masyarakat

sudah dilakukan hanya saja belum maksimal, seperti penjelasan dari ketua BUMK, menuturkan bahwa: “Jika ada penyuluhan kewirausahaan baik itu dari pemerintah, kami selaku pengurus BUMK hanya ikut membantu dalam penyuluhan tersebut, namun belum ada program khusus yang dilakukan oleh BUMK terkait pemberian seminar kewirausahaan kepada masyarakat”.

Dari keterangan-keterangan diatas kontribusi yang diberikan BUMK cukup baik, hal ini sejalan dengan pendapat (Ramadhana, 2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMK memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Namun, kontribusi ini belum maksimal seperti yang diketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMK dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD Kampung) dirasa masih belum maksimal.

Pernyataan ini diperkuat Rani (2018) menjelaskan bahwa BUMK sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan

masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMK itu sendiri.

Dari segi Hambatan dalam Pengembangan BUMK di Kampung Terangun Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti keterangan dari Ketua BUMK di Kampung Terangun:

Sebenarnya semenjak berdirinya BUMK ini, kami merasa diberdayakan pemerintah. Namun, kami masih merasa banyak kekurangan didalam menjalankannya karena, minimnya modal, lalu masi kurangnya keterampilan warga desa dalam mengurus BUMK ini, terus warga sini juga minim partisipasinya karena masi kurang pengetahuan tentang BUMK ini.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi dan SDM yang kurang memadai menghambat kinerja BUMK. Hal ini sejalan dengn temuan Meigawati (2018) yang menyatakan bahwa implementasi program BUMK belum berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMK kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan sikap masyarakat setempat serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan kampung dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggungjawab.

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka

hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.” (Hasil Wawancara Dengan Abu Kasim).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Abu Kasim pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah. (Anwar, 2014).

Pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya di pedesaan kerap kali kurang berjalan dengan baik dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa yang pada akibatnya

Program-program yang dilaksanakan di Desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kampung termasuk kampung terangun untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas kini program pembangunan di Desa Terangun mulai dilaksanakan, perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pemerintah

Desa Terangun sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Terangun terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai respon muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu dalam pembangunan di Desa Terangun hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Chabib, 2015).

Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

4.3.2 Pembangunan Kampung dalam Pengentasan

Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam.

Pemerintah kampung dalam pembangunan kampung seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam pembangunan dan perekonomian. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) diakhirat.

Kaitannya dengan pembangunan di kampung terangun berdasarkan teori diatas prinsip tauhid yang ditanamkan kepada masyarakat kampung Terangun yaitu ketika pembangunan sarana tempat ibadah dengan cara gotong royong untuk membangun madrasah diniyah dan masjid, masyarakat hadir ikut serta dalam kegiatan pembangunan dari awal proses perencanaan sampai akhir pelaksanaan.

2. Prinsip Nubuwah

Menurut Adiwarman prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Dalam bagian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adiwarman, dalam praktiknya pemerintah Kampung Terangun berupaya mempertanggung jawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah kampung yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pembangunan kampung.

3. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasarkan pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep kesimbangan pada pengelolaan di kampung Terangunn telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kampung Terangun.

4. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- 1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.
- 2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup di dunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah kampung Terangun memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

5. Prinsip Keadilan

Pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah kampung berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap rt atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari

perwakilan masyarakat kampung. Akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan masih kurang merata, masih terdapat warga yang pekerjaannya serabutan belum mendapatkan pelatihan-pelatihan agar bisa mandiri.

6. Prinsip Masalah dan Manfaat

Prinsip masalah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

Dengan adanya pemberdayaan, pengadaan pelatihan-pelatihan di kampung Terangun diharapkan dapat menjaga kelestarian serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kampung.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah sebagaimana yang

diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir ataupun miskin.

Persaudaraan dan saling tolong-menolong berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong-menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk dilaksanakan.

Adapun contoh persaudaraan dan saling tolong-menolong dalam pemberdayaan di desa Tambakbulusan yaitu dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok tani tidak melihat simiskin dan sikaya, semua dilatih sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang merata.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, sehingga dengan mereka dapat mengelola

dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud

keinginan masyarakat Desa Terangun untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Terangun sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah kampung Terangun berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan kampung yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (Al-Qashash [28] :77).

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam surat (QS Ar-Ra'd: 11) telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah, artinya Allah telah membukakkan jalan untuk umatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya, pemberdayaanya tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan mengenai program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam di kampung terangun, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Konsep pembangunan kampung memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan-pelatihan dan lain-lain.
2. Rangkaian kegiatan pembangunan pekampungan terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di kampung Terangun kecamatan telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.
3. Rangkaian strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan terdiri dari perbaikan akses jalan, pembangunan pos pelayanan terpadu, menciptakan program kelompok tani, mendirikan badan usaha milik kampung dan lain-lain.
4. Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi

maupun sosial.

5. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang dapat diberikan penulis untuk kemajuan terutama Kampung Terangun Kecamatan Terangun Gayo Lues yakni:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai masalah-masalah perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih baik.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat kampung mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
3. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan pembangunan perekonomian di perkampungan.
4. Dengan dilaksanakannya penelitian ini di harapkan pemerintah lebih memperhatikan terkait masalah data kampung, dengan tujuan untuk menghasilkan output yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. (2013). *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto Suharsimi. (2006). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Azizah Rosfa Nur. (2017). *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Angga Harahap. (2010). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)*, Medan: Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Bintarto. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Candra Kusuma Putra et al. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.
- Dede Rodin. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'a*. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.
- Fatoni. (2014). *Peran Misyakat (Micro Finance Syari'ah untuk Masyarakat) DPU (Dompot Peduli Umat) Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.

- Herdiansyah Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jayadinata dkk. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB.
- Maulana M. Indra. (2018). *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Muthoriq dkk. Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur Khoirin, et al. (2014). *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang*, Semarang: Laporan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo Semarang.
- Qardhawi Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rodin Dede. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'a*. *Jurnal Economica UIN Walisongo*.
- Sholeh Chabib, Heru Rochansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Widjaja. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Qardhawi. (2002). *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara penelitian “Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”

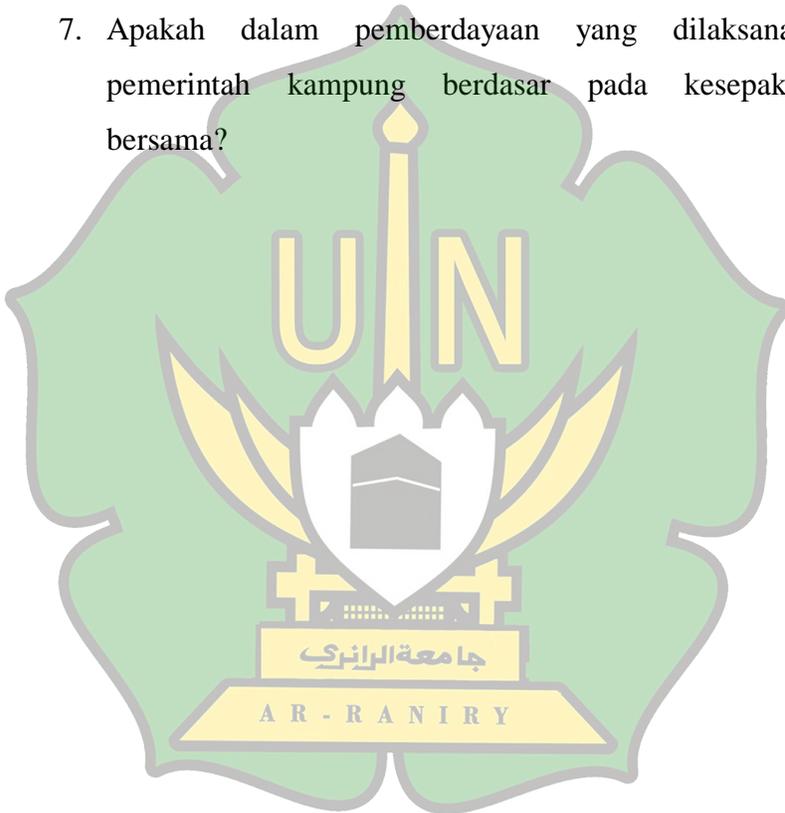
I. Data pribadi informan

Nama :
 Usia :
 Alamat :
 Jabatan :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

II. Wawancara informan

1. Apa saja strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Terangun?
2. Apa saja proses pembangunan kampung yang sudah berjalan?
3. Bagaimana antusias masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan?

4. Ada berapa jumlah kelompok tani yang dibentuk oleh kampung dalam hal pemberdayaan masyarakat?
5. Apakah dalam pengelolaan dana desa menggunakan sistem musyawarah?
6. Berapa jumlah penduduk miskin kampung Terangun?
7. Apakah dalam pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah kampung berdasar pada kesepakatan bersama?



Lampiran 2 Dokumentasi penelitian







AR-RANIRY

